



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Majapahit No. 44 Mataram
Telepon : 0370 – 7856244

Laman : www.ntb.kemenkumham.go.id Surel : kanwilntb@kemenkumham.go.id

Nomor : W21.UM.01.01 - 1244 8 April 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Yth. Tim Agen Perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Nusa Tenggara Barat
di –
Tempat.

Dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, bersama ini kami mengharapkan kehadiran Pejabat/Pegawai yang telah ditetapkan sebagai Agen Perubahan (SK Terlampir) yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 09 April 2021.
Waktu : 14.00 WITA – selesai.
Tempat : Ruang Rapat Kantor Wilayah

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Haris Sukamto.

NIP. 19660605 198911 1 001.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : W21-252-OT.03.01 Tahun 2021

TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka perlu merubah pola pikir dan budaya kerja pegawai secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk agen perubahan;
- c. Bahwa untuk menggerakkan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat tentang Agen Perubahan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455).
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Pejabat yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk bertindak sebagai Agen Perubahan dalam menggerakkan pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat mengenai pentingnya arti perubahan guna menuju kondisi yang lebih baik.

KEDUA : Menugaskan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk berperan dalam hal:

1. Sebagai Katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat;
2. Sebagai Penggerak Perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah satuan kerja yang lebih baik;
3. Sebagai Pemberi Solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan satuan kerja menuju satuan kerja yang lebih baik;
4. Sebagai Mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak luar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan proses perubahan; dan
5. Sebagai Penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan para pengambil keputusan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mataram.
Pada tanggal : 8 Februari 2021

Kepala Kantor Wilayah,



Haris Sukamto, A.K.S., SH., MH.
NIP. 19660605 198911 1 001.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat.

Nomor : W21-252-OT.03.01 Tahun 2021

Tanggal : 8 Februari 2021

SUSUNAN PELAKSANA AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1.	HARIS SUKAMTO, A.K.S.,SH.,MH. NIP. 196606051989111001	KEPALA KANTOR WILAYAH
2.	SAEFUR ROCHIM, SH., MH. NIP. 197504021998031001	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
3.	MALIKI, S.H., M.H. NIP. 196504261987031001	KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
4.	PARLINDUNGAN, S.H., M.H. NIP. 197007011992031002	KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
5.	Dr. HARNIATI, SH., LLM. NIP. 19711218 200212 1 001.	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
6.	Drs. LALU WASIL, S.H., M.H. NIP. 196412311985031005	KEPALA BAGIAN UMUM
7.	I GDE SANDI GUNASTA, S.H., M.H. NIP. 19780509 199803 1 001	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN HUMAS
8.	YUDI ADRIANTO, S.H., M.H. NIP. 19640721 199103 1 003	KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM
9.	PURI ADRIATIK CHASANOVA, S.H. NIP. 19681115 199703 2 001	KEPALA BIDANG HUKUM
10	PUAN RUSMAYADI, S.H., M.H. NIP. 19771203 200501 1 001	KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA
11.	LALU JUMAIDI, S.H., M.H. NIP. 197012311993031003	KEPALA BIDANG PEMBINAAN, BIMBINGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT
12.	AMAM SAIFULHAQ, S.H. NIP. 19680206 199103 1 002	KEPALA BIDANG PELAYANAN TAHANAN, KESEHATAN, REHABILITASI, PENGELOLAAN BASAN BARAN, KEAMANAN
13.	NGURAH NANIK IDAYANI, S.E., M.H. NIP. 196302081990032001	KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN
14.	JUNIOR MANEREP SIGALINGGING, S.H., M.H. NIP. 19701003 199203 1 001	KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
15.	I WAYAN PUSPA, S.H., M.H. NIP. 196112311981031001	PENYULUH HUKUM MADYA
16.	SUYANTO EDI WIBOWO, S.H., M.H. NIP. 197707171999031001	PERANCANG PERATURAN PERUU MADYA
17.	Drs. GUNAWAN GATHOT PRIYADI NIP. 196112141989031001	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MADYA
18.	I MADE SWECA ARTHA, S.H., M.H. NIP. 19641230 199103 1 001	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
19.	MUZHAR, S.H., M.H. NIP. 19671231 199103 1 005	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, TATA USAHA, DAN RUMAH TANGGA
20.	GUSTI AYU MADE WIDNYANI, S.H., M.H. NIP. 19691028 199303 2 001	KEPALA SUBBIDANG INFORMASI KEIMIGRASIAN
21.	GUSTI NGURAH SURYANA YULIADI, S.H., M.H. NIP. 19720723 200112 1 001	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, REFORMASI BIROKRASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI
22.	ANTONIUS BAMBANG YUNIARTO, S.H. NIP. 19660606 199001 1 001	KEPALA SUBBIDANG BIMBINGAN DAN PENGENTASAN ANAK
23.	MOH RIZKY SYARIF, S.H. NIP. 19640423 198703 1 001	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

24.	BAMBANG MUSTIKO N, S.H. NIP. 19671231 198903 1 169	KEPALA SUBBIDANG FASILITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
25.	SUPARDAN, S.H. NIP. 19711231 199103 1 002	KEPALA SUBBIDANG PEMAJUAN HAKASASI MANUSIA
26.	ADI PRIYANTO, S.H. NIP. 19671120 199203 1 002	KEPALA SUBBIDANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN
27.	SUNARYO, S.H. NIP. 19690710 199003 1 003	KEPALA SUBBIDANG PERIZINAN KEIMIGRASIAN
28.	I MADE SARTANA DITA, S.H. NIP. 19741124 199703 1 001	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
29.	RIVA DILYANTI, A.Md.I.P., S.Sos. NIP. 19830520 200112 2 001	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN TAHANAN, PERAWWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI
30.	DIDI RASIDI, S.E. NIP. 19790605 201012 1 002	KEPALA SUBBIDANG PEMBINAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KERJASAMA
31.	I GEDE PERIMA WASANA, S.E. NIP. 19820521 201012 1 003	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
32.	ISNA MATYA FEBNURJANNAH. YN., S.H. NIP. 19840208 200501 2 001	KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, DAN KEAMANAN
33.	INDRA FIRMANSYAH, S.H. NIP. 19850909 200501 1 001	KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM DAN JARINGGANDOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
34.	RICKY ADITYA SUPRATMAN, S.E. NIP. 198710282010121003	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT
35.	SUTARMI, S.H. NIP. 197303181994031003	KEPALA SUBBIDANG PENINDAKAN KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT
36.	JULIATIN KRISTIANINGRUM, S.H. NIP. 197304061992032001	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA
37.	KUNAIFI ABDILLAH, S.Kom. NIP. 199008292019011001	PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
38.	I KETUT CAHYADI PUTRA, S.H. NIP. 198803022019011001	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA
39.	I MADE DODY SUTRISNA NIP. 199106292012121001	PENYUSUN BAHAN KERJA SAMA
40.	SATRIA JUNIAWAN UTAMA NIP. 199306242012121001	PENYUSUN LAPORAN HASIL PENGAWASAN
41.	YUDI FITRAYADI, S.E. NIP. 198805172010121003	PENYUSUN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
42.	I NYOMAN SANISTRYA UTAYA NIP. 199407092012121002	PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI
43.	I DEWA MADE DWI PRASETYA UTAMA, S.H. NIP. 199007282010121001	PENYULUH HUKUM PERTAMA
44.	APRIADI, S.H. NIP. 198704252019011001	DOKUMENTALIS HUKUM



Kepala Kantor Wilayah,



Haris Sukamto, A.K.S., SH., MH.
NIP. 19660605 198911 1 001.